

Judul : Biaya Haji Ditetapkan Hari Ini
Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Biaya Haji Ditetapkan Hari Ini

Pemerintah dan DPR berencana menetapkan biaya perjalanan serta penyelenggaraan ibadah haji 1444 H pada Rabu ini. Efisiensi biaya terus dilakukan di berbagai komponen.

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai dinamika yang terjadi membuat pemerintah dan DPR menunda penetapan biaya perjalanan serta penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijrah. Biaya ibadah haji direncanakan dapat ditetapkan pada Rabu (15/2/2023) ini setelah dilakukan penyisiran dan efisiensi di berbagai komponen pembiayaan.

Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1444 H/2023 awalnya direncanakan ditetapkan pemerintah dan Komisi VIII DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2). Namun, pemerintah dan DPR belum menentu kata sepakat meskipun telah melalui proses rapat lebih dari delapan jam dan baru berakhir pada Selasa malam.

Wakil Ketua Komisi VIII

DPR Marwan Dasopang yang menjadi pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merinci kembali biaya haji tersebut. Pembahasan dan penetapan pembiayaan haji akan kembali dilakukan hari ini.

"Kami atas nama panja (panitia kerja) mohon maaf kepada masyarakat karena dijadwalkan malam ini sudah ada pengambilan keputusan terpaksa ditunda sampai besok demi kenyamanan jemaah dan perbaikan perjalanan kita," ujarnya semalam.

Selama proses RDP, pemerintah dan DPR melakukan penyisiran dan efisiensi beberapa komponen pembiayaan haji untuk berbagai keperluan jemaah selama di dalam negeri ataupun saat tiba di Tanah Suci. Dengan cara ini, biaya haji diharapkan dapat ditekan hingga

level minimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.

Salah satu biaya yang dihapus adalah pengadaan gelang jemaah haji sebesar Rp 5,5 miliar. Anggaran ini sebelumnya dikritisi Komisi VIII karena nilai satu gelang dalam usulan biaya ini dianggap terlalu besar dibandingkan dengan harga yang beredar di pasaran.

Penyisiran dan efisiensi lainnya juga dilakukan untuk pembiayaan kuliner, penginapan, dan pesawat. Beberapa komponen pembiayaan tersebut paling banyak mendapat sorotan dan memunculkan dinamika pembahasan dalam rapat.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menuturkan, pemerintah berusaha terus melakukan efisiensi dengan berbagai modi-

fikasi di lapangan dan dukungan data yang dimiliki. Setelah melalui proses penyisiran dan efisiensi, Kemenag kemudian mengusulkan BPIH sebesar Rp 90 juta.

Dari jumlah itu, Bipih atau biaya yang dibebankan kepada anggota jemaah sebesar Rp 49,8 juta atau dengan komposisi 55,3 persen. Sementara 44,7 persen pembiayaan lainnya atau sebesar Rp 40,2 juta ditanggung dana nilai manfaat.

Muncul polemik

Sebelumnya, biaya haji 2023 menjadi polemik dan perbincangan publik setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut adanya kenaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, Kemenag mengusulkan rata-rata BPIH untuk

setiap anggota jemaah mencapai Rp 98,89 juta.

Setiap anggota jemaah kemudian dibebankan 70 persen dari biaya BPIH tersebut dan 30 persen lainnya ditanggung dana nilai manfaat. Setelah dikalkulasi, Kemenag mengusulkan Bipih yang harus dibayar setiap calon anggota jemaah sebesar Rp 69,19 juta.

Biaya yang ditanggung anggota jemaah ini meningkat signifikan ketimbang tahun lalu yang besarnya Rp 39,8 juta. Tahun lalu, biaya haji menggunakan skema komposisi 40 persen dari jemaah dan 60 persen ditanggung dana nilai manfaat.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto saat RDP mengatakan, penetapan beberapa komponen biaya haji harus dilakukan dengan referensi yang benar, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. (MTK)